

BAB III

KEBIJAKAN ITALIA TERHADAP PERMASALAHAN PENGUNGGI LIBYA

Sebagai salah satu negara utama yang menerima kedatangan pengungsi asing salah satunya pengungsi dari Libya, hal tersebut berdampak pada banyaknya jumlah pengungsi yang berada di Italia. Meskipun Italia menerima kedatangan pengungsi bukan berarti Italia memberikan kebebasan kepada pengungsi untuk berlaku apa saja di Italia. Dalam bab ini penulis memberikan penjelasan tentang bagaimana kebijakan Italia dalam menangani pengungsi yang datang dan menetap di Italia, khususnya pengungsi dari Libya.

A. Masuknya Pengungsi Libya di Italia

Pada awalnya, pengungsi Italia dari Libya merupakan hasil dari penjajah Italia dan keturunan mereka dipaksa untuk pergi dari Libya setelah Perang Dunia II berakhir. Sebagian besar dari mereka berlindung di Italia, terutama setelah pengusiran mereka tahun 1970 yang diperintahkan oleh Kolonel Gaddafi pada saat itu (Curreli, 2011).

Era dekolonisasi internasional memupuk eksodus masyarakat Italia dari bekas koloni Libya di Italia, terutama setelah Libya merdeka pada 1950-an. Hampir setengah dari penjajah Italia yang tiba ketika gubernur Italo Balbo membawa ke Libya "*Ventimilli*"-nya pada 1938-1939, pergi pada akhir 1940-an. Gelombang pertama pengungsi pindah ke Italia dan segera sebagian besar dari mereka beremigrasi pada awal 1950-an untuk melanjutkan perjalanan ke Amerika (terutama ke Kanada, Venezuela, Argentina dan Amerika Serikat) dan ke Eropa barat (Perancis, Benelux, dll) (Curreli, 2011).

Setelah beberapa tahun di bawah mandat atau jajahan Inggris, pada 24 Desember 1951 Libya mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai Kerajaan Libya (sebuah konstitusi, monarki turun-temurun di bawah Raja Idris). Pada tahun 1952 memulai eksodus dari sebagian besar pemukim kolonial Italia

yang tersisa, terutama yang berada di daerah yang jauh dari kota-kota utama. Meskipun pada akhir 1950-an sebagian besar dari 110.000 masyarakat Italia yang menetap di Libya, namun sejak tahun 1940 masyarakat Italia di Libya telah meninggalkan bekas koloni mereka, beberapa ribu tetap (terutama petani dan pengrajin) dan beberapa orang bahkan mencoba untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik Libya baru. Raja Idris adalah raja yang relatif toleran, dan secara umum memperlakukan penduduk Italia dengan baik (Curreli, 2011).

Dilanjutkan pada tahun 1967, sebagai konsekuensi dari Perang Enam Hari, melalui pengangkutan udara dan bantuan beberapa kapal, Angkatan Laut Italia membantu mengevakuasi lebih dari 6.000 orang Yahudi yang berada di Libya ke Roma dalam satu bulan. Para pengungsi Yahudi ini terpaksa meninggalkan rumah mereka, bisnis mereka, serta sebagian besar harta mereka di belakang: dari 6.000 ini, sekitar 4.000 segera beremigrasi ke Israel atau Amerika Serikat, sementara mereka yang tetap tinggal di Roma (bahkan karena mereka semua berbicara bahasa Italia dan sepenuhnya terintegrasi dengan cara hidup Italia sejak 1911). Dari sekitar 15.000 orang Yahudi Romawi, sebenarnya 4.000 adalah keturunan Libya, dan merupakan bagian yang berpengaruh dari komunitas mereka (John, 2014).

Pada tahun 1970, setelah munculnya revolusi Libya, lebih dari dua puluh ribu koloni Italia bermukim di Libya tiba-tiba diusir dari negara itu dan menderita -seperti orang-orang Yahudi pada tahun 1967- dan melakukan penyitaan terhadap semua properti. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian antara Italia dan Libya yang ditandatangani pada tahun 1956: perjanjian ini disimpulkan berdasarkan Resolusi PBB tahun 1950, yang menghubungkan penciptaan monarki Libya yang independen dengan penghormatan terhadap hak dan kepentingan minoritas yang tinggal di negara mereka. Beberapa masyarakat Italia di Libya ingin meLSMrganisasi kelompok politik "perlawanan" untuk melindungi hegemoni masa lalu mereka. Tetapi setelah tahun 1970, populasi masyarakat Italia di Libya hampir menghilang ketika Kolonel Muammar Gaddafi

memerintahkan pengusiran semua penjajah Italia dan Yahudi dari Libya (John, 2014).

Mengenai "Visa" di Libya, setelah antusiasme awal setelah kunjungan Perdana Menteri Italia saat itu Silvio Berlusconi ke Gaddafi pada tahun 2004, di mana masalah tersebut tampaknya diatasi, hampir tidak ada yang dilakukan, sehingga pada tahun 2011, masyarakat Italia yang dipulangkan pada tahun 1970 dapat tidak kembali ke negara mereka sampai setelah usia 65 tahun, dan melalui perjalanan yang terorganisir dan dengan dokumen masuk resmi dalam bahasa Italia dan Arab. Bahkan mereka yang lahir di Libya tidak diberi akses, seperti halnya aktris internasional Rossana Podestà yang mengeluh telah ditolak kemungkinan untuk kembali ke tempat kelahirannya di Tripoli setelah tahun 1970 (John, 2014).

Hubungan Libya dengan migrasi bukanlah hal baru. Negara ini selalu menjadi tujuan akhir bagi para migran dan penghentian sementara bagi mereka yang ingin mencapai Eropa. Pada 2009, dua tahun sebelum penggulingan diktator Mu'ammarr Gaddafi, Libya menjadi tuan rumah di wilayahnya 2,5 juta migran, sebagian besar datang dari Negara-negara di Afrika tetapi juga dari negara-negara sejauh Bangladesh dan Filipina. Sementara, Libya semakin hanya menjadi negara transit ke Eropa. Antara 2003 dan 2012, sekitar 190.425 migran dan pencari suaka tiba di Lampedusa (Italia) dari Libya, sementara 16.445 lainnya tiba di Malta (Refugees, 2019).

Migrasi juga mempengaruhi hubungan antara Libya dan Eropa, khususnya Italia. Serangkaian panjang perjanjian, yang berpuncak dengan Perjanjian Persahabatan 2008, melakukan *outsourcing* dan penahanan balik terhadap migran dan pencari suaka ke Libya. Adapun kediktatoran lainnya di Afrika Utara, migrasi digunakan bersama dengan ancaman teroris sebagai cara untuk memanipulasi Eropa untuk mendukung aparat otoriter, terlepas dari pelanggaran berat hak asasi manusia dan konvensi internasional. Hubungan antara politik dan migrasi di Libya belum mereda setelah revolusi 2011 yang mengarah pada penggulingan kediktatoran. Pembuat kebijakan baru dari Libya pasca-revolusioner, campuran milisi yang didorong secara politik dan "pengusaha" yang mengatur

penyelundupan manusia bersama dengan kegiatan kriminal lainnya. Aliran migrasi dari Libya melalui Mediterania meningkat ketika transisi menuju demokrasi berkembang menjadi perang saudara baru selama 2014. Proyeksi untuk tahun 2015 mencapai 500.000 migran dan pencari suaka yang berusaha melarikan diri melalui laut (Refugees, 2019).

Bagi para pembuat kebijakan dari barat, perbedaan antara sebelum dan sesudah tahun 2011 adalah adanya lawan bicara yang jelas, meskipun tidak menyenangkan, dalam penerapan sebagian besar kebijakan represif yang ditujukan untuk mengendalikan migrasi, sebuah fenomena yang dilihat melalui lensa keamanan sebagai ancaman dalam dirinya sendiri. Dengan Gaddafi, setidaknya ada alamat dan seseorang yang secara efektif dapat mendorong kembali para migran atas nama Eropa. Setelah keruntuhannya, tidak ada lembaga negara yang efektif yang dapat mengambil alih, dan disintegrasi bertahap pemerintah Libya menyebabkan runtuhnya kebijakan ini, terutama sejak 2014 dan setelahnya. Eksternalisasi kontrol migrasi di Libya telah gagal, dan bukan hanya karena runtuhnya rezim yang ditugaskan untuk mengimplementasikannya. Faktanya, penyelundupan manusia melalui Libya harus dianggap sebagai kegiatan kriminal yang dilakukan oleh organisasi tertentu sehubungan dengan lembaga resmi negara (Refugees, 2019).

Puncak arus migrasi dari Libya melalui Mediterania adalah hasil dari beberapa faktor, di antaranya adalah bahwa kebijakan yang diterapkan di Eropa (dan khususnya di Italia) memiliki dampak terbatas. Namun, yang lebih penting adalah kekuatan jaringan kriminal yang mengelola penyelundupan manusia; kebijakan pintu terbuka atau tertutup dengan Afrika sub-Sahara diimplementasikan oleh Libya; daya tarik ekonomi Libya dalam hal peluang kerja; situasi keamanan di negara ini; dan munculnya konflik dan krisis kemanusiaan di negara asal migran dan pencari suaka. Interaksi antara faktor-faktor ini dikombinasikan dengan kelemahan tradisional lembaga-lembaga negara Libya, bahkan di bawah Gaddafi. Kelemahan ini menjadi sangat parah setelah pecahnya perang saudara baru pada tahun 2014, yang menyebabkan runtuhnya pemerintah

pusat dan pembentukan dua pemerintah yang sebagian besar tidak efektif di Tobruk dan Tripoli, tidak ada yang tampaknya mengendalikan apa yang tersisa. Hal ini menimbulkan tantangan lain bagi orang Eropa, karena kebijakan eksternalisasi kontrol migrasi sekarang tidak hanya sebagian besar tidak efektif tetapi secara praktis tidak bisa dijalankan karena kurangnya aktor politik kepada siapa untuk melakukan outsourcing implementasi. Sudah saatnya untuk berpikir bahwa mengakui bahwa Libya akan kekurangan lembaga yang kuat untuk sementara waktu sambil mempertimbangkan bahwa itu adalah situasi politik, ekonomi dan keamanan di negara itu (dan di lingkungannya) yang merupakan faktor "pendorong" terbesar dalam arus migrasi Mediterania. Faktor "pendorong" ini sebagian besar bertanggung jawab atas peningkatan jumlah yang diamati sepanjang 2014 dan pada bulan-bulan pertama 2015, dan pada akhirnya membuktikan kelemahan orang-orang yang berpendapat bahwa operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) yang kuat untuk para migran di Mediterania merupakan "tarik" faktor yang akan mengarah ke angka yang lebih tinggi. Peningkatan jumlah migran baru-baru ini tidak berhenti ketika operasi SAR yang lebih komprehensif Mare Nostrum memberi jalan kepada operasi Triton yang sangat terbatas; melainkan, puncaknya jumlah bertepatan dengan eskalasi perang saudara Libya. Meningkatnya jumlah migran dan operasi SAR yang masih baru telah menghasilkan korban yang sangat tinggi di laut, sementara pada akhirnya meningkatkan tekanan politik dan ekonomi pada masyarakat di Eropa di mana para migran ini mencoba untuk menetap. Ini kemudian merupakan faktor "pendorong" bagi pihak xenophobia dan anti-imigrasi dari Roma ke Stockholm. Tetapi lingkaran setan antara krisis di Libya, kebangkitan arus migrasi, dan xenofobia di Eropa ini tidak terhindarkan. Reformasi kebijakan yang sebagian besar tidak efektif adalah layak dan perlu. Makalah ini akan mencoba memetakan agenda baru dalam hal ini, tanpa ambisi untuk memberikan solusi yang siap pakai (Refugees, 2019).

Pertama, pola migrasi akan diperiksa, menggambarkan perubahan yang telah terjadi sejak penggulingan Gaddafi dan perubahan lebih lanjut yang terjadi sejak awal perang saudara

Libya yang baru. Kedua, ekonomi ilegal arus migrasi melalui dan dari Libya akan diperiksa, khususnya melihat dinamika yang mendukung maraknya penyelundupan manusia di negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Justru apa yang telah terjadi sejak 2011 dan bahkan lebih lagi setelah runtuhnya pemerintah Libya pada musim panas 2014 yang membuat outsourcing migrasi tidak dapat dikendalikan. Peristiwa yang mengarah pada penciptaan ruang tak terkendali yang luas di Libya, matang untuk penyelundupan manusia, akan diperiksa di bagian ketiga. Bagian keempat akan mencoba menunjukkan masalah baru: transformasi Libya dari negara tujuan atau transit bagi migran menjadi negara emigrasi karena pendalaman perang saudara. Akhirnya, sembilan rekomendasi kebijakan berbeda akan dibahas untuk memperluas gagasan desecuritisation migrasi dari Libya (Refugees, 2019).

Pada 2013, kedutaan Italia di Tripoli adalah salah satu dari sedikit kedutaan Barat yang masih aktif di Libya selama kekerasan pasca-perang saudara di Libya karena fakta bahwa Italia adalah mitra dagang paling penting bagi Libya dan ada 624 pekerja Italia (dari Perusahaan Italia, terutama yang berkaitan dengan minyak) di negara ini. Hanya sedikit masyarakat Italia yang tinggal di Libya, dan pengungsi Italia dari Libya mempertahankan organisasi mereka sendiri yang disebut *Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia* (AIRL) dengan majalah mereka sendiri (John, 2014).

Pada bulan Maret 2016, Uni Eropa mencapai kesepakatan dengan Turki yang menyebabkan penurunan tajam kedatangan baru di pulau-pulau Yunani. Fokus kemudian bergeser ke rute Mediterania Tengah antara Libya dan Italia. Selama tahun lalu, pemerintah Eropa telah menerapkan strategi yang dirancang untuk menurunkan jumlah pengungsi dan penyeberangan migran di sepanjang rute ini. Namun, strategi ini datang dengan biaya yang tidak dapat diterima bagi para pencari suaka, pengungsi, dan migran sendiri, yang menghadapi kondisi yang mengerikan di Libya dan perjalanan laut yang bahkan lebih mematikan di Mediterania (Ekinci, 2018).

Pada bulan Februari 2017, para kepala negara-negara anggota Uni Eropa mengeluarkan deklarasi bersama yang

menetapkan strategi untuk membatasi aliran migran, pencari suaka, dan pengungsi yang melakukan perjalanan ke Eropa di sepanjang rute Mediterania Tengah. Pilar utama dari strategi ini adalah upaya Uni Eropa, yang dipimpin oleh Italia, untuk melengkapi dan melatih Penjaga Pantai Libya untuk mencegah para pengungsi dan migran di perairan Libya dan kemudian mengembalikan mereka ke tanah Libya, yaitu sesuatu yang tidak dapat dilakukan kapal-kapal Eropa di bawah hak asasi manusia Eropa dan hukum internasional. Dalam keputusannya tahun 2016 di Hirsi Jamaa dan Lainnya, Pemerintah Italia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menemukan bahwa intersepsi dan kembalinya pencari suaka dan migran ke Libya melanggar prinsip *non-refoulement* karena risiko penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya yang mereka hadapi di Libya (Ekinci, 2018).

Pada bulan Juli 2017, bukannya lonjakan penyeberangan yang khas untuk bulan-bulan musim panas, kedatangan ke Italia menurun tajam. Meskipun pemerintah Italia telah membantahnya, telah secara luas dicurigai bahwa penurunan tersebut, pada kenyataannya, adalah hasil dari GNA yang membayar kelompok bersenjata untuk mencegah kapal-kapal berangkat, sebagai cara untuk mengimplementasikan perjanjiannya dengan Italia. Meskipun jatuh, Mediterania Tengah terus berfungsi sebagai rute utama bagi para pengungsi, pencari suaka, dan migran yang bepergian secara tidak teratur ke Eropa. Seperti yang dibahas di bawah ini, persimpangan itu sendiri telah menjadi lebih mematikan bagi mereka yang mencobanya. Para pengungsi, pencari suaka, dan migran yang melakukannya sekarang terutama dari Eritrea, Tunisia, Pakistan, dan Nigeria, meskipun banyak negara lain dari Afrika Timur dan Barat juga diwakili (Ekinci, 2018).

Pada bulan November 2017, CNN merilis video tentang apa yang tampaknya merupakan pelelangan budak migran Sub-Sahara di Libya. Para migran dijual seharga \$ 400. Meskipun laporan semacam itu bukanlah hal baru, video itu memancing kemarahan global. Pada bulan yang sama, masalah ini menjadi fokus pertemuan puncak antara Uni Eropa dan Uni Afrika. Pada pertemuan puncak itu, para pemimpin Eropa dan

Afrika berkomitmen pada tiga prioritas: (1) memperbaiki kondisi para migran dan pengungsi yang terperangkap di Libya; (2) memfasilitasi pengembalian sukarela migran ke negara asal; dan (3) menciptakan solusi yang tahan lama bagi para pengungsi yang tidak bisa pulang (Ekinci, 2018).

B. Kebijakan Italia dalam Menangani Pengungsi Libya

Pemerintah Italia sendiri telah mendeklarasi tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang dimana dalam pasal 14 menyatakan bahwa "*setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka negara-negara lain dari penganiayaan.*" Pemerintah Italia juga telah melakukan penandatanganan terhadap Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966 dan Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar tahun 1950. Kedua instrumen ini berisi ketentuan tentang suaka (Italia K. d., 2014).

Pada tahun 1954, Pemerintah Italia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Status Pengungsi tahun 1951. Konvensi ini tidak menetapkan kewajiban apa pun bagi negara untuk mengakui kedalam wilayahnya orang-orang yang mengajukan status pengungsi. Satu-satunya kewajiban yang ditetapkan dalam Konvensi ini adalah prinsip non-pembatalan—larangan untuk;

“Mengusir atau mengembalikan (pengungsi) dengan cara apapun ke perbatasan wilayah yang mana kehidupan atau kebebasannya akan terancam karena tanggung jawab atas ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau opini politik.” (Italia K. d., 2014).

Konvensi ini juga memberikan pengecualian terhadap kewajiban yang disebutkan di atas dalam kasus;

“Seorang pengungsi memiliki alasan yang masuk akal untuk dianggap sebagai bahaya bagi keamanan negara di mana ia berada, atau yang, telah dihukum oleh putusan akhir dari suatu khususnya kejahatan serius, merupakan bahaya bagi komunitas negara itu” (Italia K. d., 2014).

Sejak 2007, Perjanjian Uni Eropa telah memberikan kebijakan bersama terhadap negara-negara di Eropa tentang suaka. Sampai saat ini, tidak ada instrumen internasional yang memberikan hak suaka universal yang telah diadopsi oleh Pemerintah Italia. Namun, Italia adalah satu dari sedikit negara Eropa yang menyatakan hak suaka dalam Konstitusi mereka. Konstitusi Italia menetapkan bahwa;

"[a] Orang asing yang, di negara asalnya, ditolak pelaksanaan kebebasan demokratis yang sebenarnya dijamin oleh konstitusi Italia berhak atas hak suaka di bawah kondisi yang ditetapkan oleh hukum (Italia K. P., 2014)."

Status pengungsi berhenti dibawah hukum Italia ketika para pengungsi secara sukarela; (1) Kembali memanfaatkan perlindungan kewarganegaraan mereka; (2) Telah kehilangan kewarganegaraan mereka dan secara sukarela mendapatkannya kembali; (3) Telah memperoleh kewarganegaraan Italia atau kewarganegaraan lain dan menikmati perlindungan negara baru mereka; (4) Secara sukarela membangun kembali diri mereka di negara yang mereka tinggalkan atau tempat mereka belum kembali karena takut akan penganiayaan; (5) Tidak lagi memungkinkan untuk meninggalkan perlindungan negara kewarganegaraan mereka, karena mereka tidak lagi mematuhi persyaratan yang memungkinkan pengakuan status pengungsi; (6) Atau kembali ke negara di mana mereka memiliki tempat tinggal yang biasa (jika mereka adalah orang tanpa kewarganegaraan), karena mereka tidak lagi memenuhi persyaratan yang memungkinkan pengakuan status pengungsi. Alasan yang dinyatakan dalam dua poin terakhir di atas tidak

berlaku ketika para pengungsi berpendapat bahwa ada alasan utama yang muncul dari penganiayaan sebelumnya yang sifatnya seperti itu yang mendorong mereka untuk menolak perlindungan negara kewarganegaraan mereka atau, dalam kasus orang tanpa kewarganegaraan, dari negara tempat mereka tinggal (Italia K. P., 2014).

Perubahan keadaan mungkin tidak bersifat sementara dan harus sedemikian rupa untuk menghilangkan rasa takut akan penganiayaan yang beralasan, dan pertimbangan kemanusiaan yang serius yang menghambat kembalinya ke negara asal harus bertahan. Penghentian dinyatakan berdasarkan evaluasi individu dari situasi pribadi orang asing. Status pengungsi dapat dicabut oleh otoritas Pemerintah Italia ketika alasan hukum untuk menolak status muncul, fakta-fakta telah disajikan secara salah atau dihilangkan oleh pemohon, atau dokumentasi palsu telah diproduksi (Italia K. P., 2014).

Pengungsi atau orang asing yang dirawat di bawah perlindungan anak perusahaan dapat diasingkan ketika mereka dianggap membahayakan keamanan negara, atau ketertiban umum atau keamanan setelah dihukum karena kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman penjara empat hingga sepuluh tahun. Pemohon yang telah memperoleh status pengungsi atau perlindungan tambahan dapat secara tegas melepaskan status mereka. Undang-undang ini juga mengatur program repatriasi sukarela orang-orang yang menerima manfaat perlindungan internasional (Italia K. P., 2014).

Hukum Pemerintah Italia melindungi kesatuan keluarga mereka yang menerima status pengungsi dan status perlindungan anak perusahaan. Anggota keluarga yang tidak berhak atas status perlindungan internasional menikmati hak yang sama dengan yang diberikan kepada anggota keluarga mereka yang menikmati status tersebut. Anggota keluarga dari orang-orang yang diberikan status perlindungan internasional yang hadir di wilayah nasional dan tidak secara individual berhak atas hak tersebut dapat memperoleh izin tinggal berdasarkan “alasan keluarga” sebagaimana diatur dalam undang-undang. Anggota keluarga yang atau akan dikeluarkan dari status pengungsi atau tunduk pada status perlindungan anak

perusahaan tidak memenuhi syarat untuk menerima manfaat ini (Panebianco, 2016).

Pengecualian yang terjadi dalam keadaan terbatas, pengungsi dan orang yang dilindungi dapat bersirkulasi secara bebas di wilayah nasional. Undang-undang ini bertujuan untuk mempromosikan inisiatif yang tepat yang mengatasi kerugian yang dihadapi para pengungsi dan orang-orang yang dilindungi setelah kehilangan perlindungan dari negara asal mereka, dan untuk menghilangkan semua hambatan yang menghambat integrasi penuh (Panebianco, 2016).

Pengungsi dan orang-orang yang menerima perlindungan anak perusahaan memiliki hak untuk perlakuan yang sama yang ditetapkan untuk warga negara Italia yang bekerja untuk orang lain atau wiraswasta, dan yang mendaftar dengan entitas profesional. Pengungsi dan orang yang menerima perlindungan anak perusahaan juga dapat mengakses pekerjaan sektor publik di bawah kondisi dan batasan yang ditetapkan untuk warga negara Uni Eropa. Orang-orang ini juga memiliki akses ke sistem pendidikan umum Italia dan pelatihan profesional. Untuk memperoleh kualifikasi profesional dan memvalidasi kembali gelar profesional yang diperoleh di luar negeri, pengungsi dan orang yang dilindungi harus mematuhi persyaratan hukum (Panebianco, 2016).

Pengungsi dan orang yang dilindungi memiliki hak untuk perlakuan yang sama yang diberikan kepada warga Italia dalam hal bantuan sosial dan kesehatan, termasuk perawatan psikologis untuk penyiksaan sebelumnya dan penderitaan yang dialami oleh mereka. Undang-undang menetapkan sistem perlindungan bagi pemohon suaka dan pengungsi yang berputar di sekitar entitas lokal yang didedikasikan untuk bantuan orang-orang ini. Kementerian Dalam Negeri mengalokasikan dana setiap tahun untuk efek ini. Untuk mempercepat sistem perlindungan bagi pemohon suaka, pengungsi, dan orang asing dengan izin kemanusiaan, dan untuk memfasilitasi koordinasi sistem perlindungan ini di tingkat nasional, Kementerian Dalam Negeri diberi wewenang untuk membuat *Sistema di Protezione Per Richiedenti Asilo E Rifugiati (SPRAR)* dengan tujuan memberikan informasi kepada, mempromosikan, berkonsultasi

dengan, memantau, dan memberikan dukungan teknis kepada entitas lokal yang memberikan bantuan kepada pemohon suaka, pengungsi, dan orang asing dengan izin kemanusiaan. SPRAR berada di bawah pengawasan langsung Asosiasi Nasional Kotamadya Italia. Di antara fungsi-fungsi lainnya, tugas SPRAR meliputi memantau keberadaan para pemohon suaka, pengungsi, dan orang asing dengan izin kemanusiaan di negara tersebut; membuat basis data mengenai intervensi di tingkat lokal untuk kepentingan orang-orang ini; dan mempromosikan program repatriasi bersama dengan Kementerian Luar Negeri (Hammond, 2017).

Otoritas Pemerintah Italia harus memberi tahu perwakilan diplomatik atau konsuler terdekat dari negara asal orang asing mengenai penahanan orang asing tersebut atau pengusirannya dari wilayah nasional; atau tentang perlindungan anak asing, kematian orang asing, atau perawatan rumah sakit orang asing yang mendesak. Pihak berwenang harus menyerahkan dokumen dan benda-benda milik orang asing ke kantor-kantor perwakilan tersebut. Informasi yang disebutkan di atas tidak disediakan dalam kasus orang asing yang telah mengajukan klaim suaka, atau status pengungsinya telah diakui, atau dalam kasus orang asing mendapatkan manfaat dari tindakan perlindungan sementara untuk alasan kemanusiaan (Hammond, 2017).

Izin tinggal yang diberikan kepada orang yang memiliki status pengungsi berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang. Pemegang status perlindungan anak perusahaan juga diberikan izin tinggal, yang memungkinkan mereka untuk bekerja dan belajar di Italia. Sementara memegang status pengungsi yang diberikan di Italia, orang asing dapat melakukan perjalanan ke luar negeri setelah mendapatkan otorisasi dari polisi. Ketika orang-orang yang dilindungi anak perusahaan memiliki alasan yang masuk akal untuk tidak meminta paspor dari otoritas diplomatik negara kewarganegaraan mereka, otoritas polisi Italia dapat memberi mereka izin perjalanan. Aplikasi untuk semua jenis izin dapat ditolak atau izin ditarik karena alasan serius terkait dengan keamanan nasional dan ketertiban umum (Hammond, 2017).

Namun, menurut data dari *Human Right Watch*, pada tahun 2017, pendekatan tidak manusiawi pemerintah Italia saat ini untuk pengungsi dan migran telah mencapai titik terendah yang baru. Hal tersebut ditandai dengan munculnya berita bahwa Italia telah menekan Panama untuk mencabut penggunaan benderanya di Aquarius, satu-satunya kapal penyelamat Non-Pemerintah yang beroperasi di lepas pantai Libya. Pada hari berikutnya, Dewan Menteri Italia menyetujui keputusan untuk secara tajam membatasi akses ke suaka, menurunkan peringkat yang diterima para pencari suaka, dan meningkatkan penahanan imigrasi (Sunderland, 2018).

Pemaksaan terhadap Aquarius untuk berlabuh berarti jumlah kematian dalam rute migrasi paling mematikan di dunia bisa naik lebih tinggi lagi. Setidaknya kurang lebih 1.260 orang telah meninggal atau hilang tahun ini di Mediteranea tengah - antara Libya / Tunisia dan Italia / Malta. Kepala Pemerintahan Uni Eropa yang bertanggung jawab harus menawarkan Aquarius bendera mereka sehingga dapat melanjutkan pekerjaan penyelamatan nyawanya. Bagi mereka yang selamat dan dapat mengelola meskipun memiliki peluang besar untuk mencapai wilayah Italia, melalui "Keputusan Salvini" yang dinamai setelah wakil perdana menteri / menteri dalam negeri yang kuat dari Italia, akan tetap membuat hidup para pengungsi jauh lebih sulit (Sunderland, 2018).

Keputusan Salvini ini merupakan keputusan untuk membatasi kriteria dalam mendapatkan visa kemanusiaan untuk tetap berada di Italia. Keputusan tersebut nantinya akan mulai berlaku ketika dan jika presiden menandatangani,. Visa telah membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dan pelecehan ekstrem, termasuk di Libya, tetapi yang tidak memenuhi definisi pengungsi yang sempit di bawah Konvensi Pengungsi 1951. Dekrit ini juga membatasi akses ke tempat penampungan yang memadai bagi para pencari suaka yang rentan, selain dari pengurangan 20.000 ruang sejak pemerintah ini berkuasa pada bulan Juni, dan melipatgandakan jumlah waktu orang dapat ditahan sambil menunggu deportasi, dari 90 hari menjadi 180. Keputusan tersebut juga akan memperluas daftar pelanggaran yang status pencabutannya dapat dicabut

dan memungkinkan pihak berwenang untuk membatalkan klaim suaka jika orang hanya dituduh melakukan pelanggaran tersebut, bahkan jika mereka belum dihukum. Langkah-langkah ini kemungkinan besar melanggar Konvensi Pengungsi 1951 dan hukum suaka Uni Eropa (Sunderland, 2018).

Dari penjelasan bab ini penulis melihat bahwa kebijakan Italia dalam menangani persoalan pengungsi yang masuk ke wilayahnya mengacu pada Konvensi PBB tentang Status Pengungsi tahun 1951 dan Pemerintah Italia secara hukum berada dibawah aturan *European Human Rights Law*. Namun yang lebih berwenang tetaplh UNHCR dalam menangani pengungsi, yang seharusnya dapat bekerjasama dengan Uni Eropa dengan baik. Namun, kebijakan Italia yang tidak memenuhi hak-hak pengungsi dan hanya memberikan izin tinggal sementara berujung pada terbatasnya ruang gerak pengungsi Libya sehingga mereka sangat bergantung pada bantuan-bantuan yang diberikan. Hal ini yang kemudian membuat UNHCR berupaya untuk menerapkan solusi integrasi lokal. Namun pada realitanya solusi integrasi lokal bagi pengungsi Libya di Italia masih sulit untuk diterapkan UNHCR. Maka dari itu, permasalahan mengenai pengungsi Libya di Italia ini harus diselesaikan secara kolektif atau secara bersama-sama. Baik UNHCR, Pemerintah Italia, dan aktor-aktor terkait lainnya tidak dapat menyelesaikan masalah pengungsi ini sendiri-sendiri, mereka harus saling berkolaborasi agar permasalahan tentang pengungsi ini dapat terselesaikan. Hal tersebut akan penulis jelaskan pada bab selanjutnya.